

**ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS
LABA DAN MANAJEMEN LABA DI
BURSA EFEK INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

ADITYA BAYUPUTRANTO AJI
NIM. C2C606002

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Aditya Bayuputranto Aji
Nomor Induk Mahasiswa : C2C606002
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS
LABA DAN MANAJEMEN LABA

Dosen Pembimbing : Dr. H. Sugeng Pamudji, M. Si., Akt

Semarang, 03 April 2012

Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Sugeng Pamudji, M. Si., Akt)

NIP. 130808733

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Aditya Bayuputranto Aji

Nomor Induk Mahasiswa : C2C606002

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK
KOMITE AUDIT TERHADAP KUALITAS
LABA DAN MANAJEMEN LABA DI BURSA
EFEK INDONESIA

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 03 April 2012

Tim Penguji

1. Dr. H. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt (.....)
2. Abdul Muid, SE, M.Si., Akt (.....)
3. Wahyu Meiranto, SE, M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Aditya Bayu Putranto Aji, menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Pengaruh Karakteristik Komite audit terhadap Kualitas laba dan Manajemen Laba, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulisan lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya diterima.

Semarang, 03 April 2012

Yang membuat pernyataan,

(Aditya Bayuputranto Aji)

NIM : C2C606002

HALAMAN MOTTO

“Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah. Yang mengajar dengan Qalam. Dialah yang mengajar manusia segala yang belum diketahui” (Q.S Al-‘Alaq 1-5).

Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya.

Barang siapa terlambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bias dipercepat oleh nasabnya. (H.R Muslim dalam Shahih-nya).

“Tidak boleh dengki dan iri hati kecuali dalam 2 hal: iri hati terhadap orang yang dikaruniai harta dan dia selalu menginfakannya pada malam hari dan siang hari. Juga iri hati kepada yang diberi kepandaian membaca Al-Qur’an, dan dia membacanya setiap malam dan siang hari.” (H.R Bukhari dan Muslim)

Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk ALLAH S.W.T yang maha gaib.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sebuah pengharapan dari niat yang tulus, alhamdulillah selalu diberikan kemudahan oleh-Nya. Sebuah usaha kecil dari kewajiban dalam agama-Mu (menuntut ilmu), alhamdulillah telah Engkau lapangkan jalannya. Ya Allah, terima kasih atas rahmat serta hidayahnya kepadaku dan kepada Nabi Muhammad SAW teladanku dan umatnya yang membawa cahaya di dunia-Mu.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua ku, Ayahanda Drs. Nugroho, M.BA dan Ibunda tercinta Yustiningsih, SE atas doa yang selalu mengiringi langkahku. Semoga Allah SWT, melindungi dan menyayangi keduanya.

Adik-adik ku tercinta Aditya Tofan Putranto Aji dan Mega Ajeng Kartikasari yang selalu memberikan doa dan senyum setiap hari padaku.

Adinda Erlyna Nur Syahrini yang telah memberikan kasih sayang dan semangatnya padaku, terima kasih semangatmu masih tetap ada sampai sekarang.

Teman-teman FE UNDIP seangkatan khususnya kelas B. Teruslah berjuang, jangan berhenti bermimpi dan meraihnya. *Keep spirit* dimanapun berada.

Wassalamualaikum Wr. Wb

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Kualitas Laba Dan Manajemen Laba” tahun 2012.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Selanjutnya penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, MSi., Akt., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
2. Dr. H. Sugeng Pamudji, M.Si., Akt selaku dosen pembimbing utama penyusunan Skripsi ini.
3. Abdul Muid, SE, M.Si., Akt selaku penguji pertama saya.
4. Wahyu Meiranto, SE, M.Si., Akt selaku penguji kedua saya.
5. Bapak/Ibu Dosen beserta seluruh staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
6. Bapak, Ibu, Mbahti, Dek Tofan, Dek Ajeng, Erlyna yang selalu memberikan dorongan, doa serta motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman FE UNDIP seperjuangan, terima kasih atas semangat dan bantuan yang telah diberikan selama penyusunan Skripsi ini.

Tak Ada Gading Yang Tak Retak, demikian Skripsi ini dibuat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan limpahan rahmat, petunjuk dan bimbingannya terhadap setiap niat baik kita, dan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Amin.

Semarang, 03 April 2012

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara karakteristik Komite audit dengan kualitas laba dan manajemen laba pada perusahaan di Indonesia. Karakteristik komite audit yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran keanggotaan komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi pertemuan dari para anggota komite audit.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dependen yang meliputi manajemen laba, kualitas laba, dan variabel independen yaitu ukuran komite audit, independensi komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit.

Hasil penelitian ini secara simultan berhasil membuktikan bahwa faktor ukuran komite audit, komite audit independen dan pertemuan komite audit memberikan pengaruh terhadap manajemen laba namun tidak signifikan terhadap kualitas laba.

Kata kunci : komite audit, kualitas laba, manajemen laba.

ABSTRACT

This study aims to examine the relationship between specific characteristics of the audit committee and earnings quality of earnings management in companies in Indonesia. Audit committee characteristics used in this study include the size of the membership of the audit committee, audit committee independence, and the frequency of meetings of audit committee members.

The research was carried out by the method of documentation. Data collection and documentation is done by classification category written data related to the research problem. Variables used in this study were dependent variables include earnings management, earnings quality, and the independent variable is the size of the audit committee, audit committee independence and audit committee meeting frequency.

The results proved that the simultaneous audit committee size factor, the independent audit committee and audit committee meeting to give effect to earnings management, but not significantly affect earnings quality.

Key words: audit committee, quality of earnings, earnings management.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II DASAR TEORI	
A. Teori Keagenan	7
B. Manajemen Laba	9
C. Kualitas Laba	12
D. Komite Audit	13
E. Penelitian Terdahulu	21
F. Kerangka Pemikiran	23
G. Pengembangan Hipotesis	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	30
1. Variabel Dependen	30
2. Variabel Independen	33
B. Penentuan Populasi dan Sampel	35

C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Metode Pengumpulan Data	36
E. Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN	
A. Statistik Deskriptif	41
B. Analisis Data	43
1. Model Manajemen Laba	43
2. Model Kualitas Laba	51
C. Pembahasan	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Keterbatasan	62
C. Saran	62
D. Implikasi Penelitian Mendatang	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	22
Tabel 4.1	Deskripsi Variabel Penelitian	42
Tabel 4.4	Uji Multikolinieritas	46
Tabel 4.5	Uji Autokorelasi Model Regresi	48
Tabel 4.6	Uji F Model Regresi	49
Tabel 4.7	Koefisien Determinan Model Regresi	49
Tabel 4.8	Uji T Model Regresi	50
Tabel 4.4	Uji Multikolinieritas	54
Tabel 4.5	Uji Autokorelasi Model Regresi	56
Tabel 4.6	Uji F Model Regresi	57
Tabel 4.7	Koefisien Determinasi Model Regresi	57
Tabel 4.8	Uji T Model Regresi	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Penelitian	25
Gambar 4.1	Uji Normalitas Awal	45
Gambar 4.5	Uji Heteroskadasitas Model Regresi	47
Gambar 4.3	Uji Normalitas-2.....	52
Gambar 4.4	Uji Normalitas-2 Setelah Mengeluarkan <i>Outlier</i>	53
Gambar 4.5	Uji Heteroskadasitas Model Regresi	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena dari teori keagenan (*agency theory*) (Jensen dan Meckling, 1976) mengindikasikan bahwa adanya perbedaan kepentingan antara pihak internal dan pihak eksternal dapat mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan laporan keuangan. Hal itu dikarenakan bagi pihak internal (manajemen) pentingnya laporan keuangan perusahaan untuk menunjukkan prestasi hasil kerja mereka dan menunjukkan kondisi yang baik terhadap pihak eksternal walaupun kondisi perusahaan sedang tidak baik sebagai tujuan untuk mempertahankan para investor agar tetap melakukan investasi kepada perusahaan. Sedangkan pentingnya laporan keuangan bagi pihak eksternal (investor, kreditor, pemilik, pemerintah, masyarakat) selaku pemakai laporan keuangan perusahaan adalah untuk mengetahui kondisi perusahaan yang sesungguhnya pada saat ini sehingga dapat memprediksikan kondisi perusahaan masa depan yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oportunistik dari agen, yaitu perilaku manajemen untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang berlawanan dengan kepentingan prinsipal. Salah satu contoh masalah keagenan muncul manakala manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan bonus dari *prinsipal* (Watts and Zimmerman Halim dkk, 2005).

Masalah keagenan juga muncul karena keberadaannya sebagai pengelola perusahaan, manajer sebagai agen lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal

pemberian informasi yang digunakan prinsipal untuk memberikan intensif kepada agen. Agen yang mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh, tidak akan memberikan informasi yang kurang menguntungkan, sehingga menimbulkan informasi yang tidak simetris (Ujiyantho & Pramuka, 2007). Informasi yang tidak simetris antara agen dan prinsipal dapat memberikan kesempatan kepada agen untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*). Lebih banyaknya informasi yang dimiliki agen dibandingkan prinsipal menjadikan agen dapat memilih berbagai metode akuntansi untuk tujuan yang dapat memaksimalkan kemakmurannya.

Langkah yang dapat digunakan dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, maka diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif dapat mengarahkan kegiatan operasional perusahaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda.

Dalam rangka pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, Bursa Efek Indonesia (BEI) mengeluarkan peraturan yang mengatur tentang pembentukan komite audit. Peraturan mewajibkan perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki komite audit. Komite audit harus beranggotakan 30% anggota independen, memiliki keahlian dalam bidang akuntansi.

Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan (Teoh dan Wong dalam Suaryana, 2005) sehingga persepsi mengenai kinerja komite audit akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan.

Komite audit merupakan elemen kunci di dalam struktur *corporate governance* yang membantu mengendalikan dan memonitor manajemen. Komite audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dengan tugas dan tanggung jawab utama untuk memastikan prinsip-prinsip *good corporate governance* di suatu perusahaan, dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan.

Komite audit memiliki peran penting dalam tugas membantu Dewan Komisaris untuk melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Hal tersebut terutama berkaitan dengan masalah yang berhubungan dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan keuangan, dengan tujuan melindungi kepentingan pemegang saham.

Komite audit memberikan kontribusi bagi pengembangan rencana strategis perusahaan dengan memberikan masukan dan rekomendasi kepada dewan berkaitan dengan masalah keuangan atau operasional. Oleh karena itu, komite audit yang efektif akan fokus pada peningkatan kinerja dan daya saing perusahaan, terutama pada lingkungan bisnis yang berubah diluar kontrol perusahaan (Craven dan Wallace, 2001) dan fokus pada optimalisasi kekayaan pemegang saham sehingga dapat mencegah maksimalisasi kepentingan pribadi oleh manajemen.

Di Indonesia keberadaan Komite audit dipertegas dengan Keputusan Bapepam dalam SE Bapepam No. 03 tahun 2000 mengenai pembentukan Komite audit dan Keputusan Direksi BEJ No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan pencatatan efek di Bursa yang mencakup Komisaris Independen, Komite audit, Sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor. Persyaratan ini telah ditetapkan oleh Bapepam di Indonesia melalui pedoman *good corporate governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002.

Pedoman *good corporate governance* dipersiapkan dan disusun oleh *Task Force* Komite audit yang dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan *good corporate governance* dengan tujuan memberikan bimbingan kepada perusahaan Indonesia dalam pembentukan suatu Komite audit yang efektif, terutama berkaitan dengan ukuran, independensi, frekuensi pertemuan, dan kemampuan penguasaan anggota di bidang akuntansi dan keuangan. Seluruh perusahaan yang terdaftar diwajibkan untuk mematuhi rekomendasi dalam hal karakteristik Komite audit.

Melalui SE-03/PM/2000, Bapepam mensyaratkan pembentukan Komite audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan.

Bursa Efek Jakarta (BEJ) menyatakan bahwa Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan (Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000).

Penyerahan peran pengawasan dari Dewan Komisaris kepada Komite Audit telah memperluas fungsi Komite Audit untuk mencakup area yang lebih luas termasuk mengawasi manajemen dan sistem pengendalian, dan menyetujui strategi perusahaan (De Zoort *et al.*, 2002). Porter (1991) dalam Wardhani (2006) menyatakan bahwa kesuksesan atau kegagalan suatu perusahaan kemungkinan disebabkan oleh strategi yang diterapkan oleh perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya mencakup strategi penerapan sistem *good corporate governance* dalam perusahaan. Kegagalan berbagai perusahaan di seluruh dunia dalam mencapai tujuan yang diharapkan, atau bahkan untuk dapat bertahan dalam dunia usaha, selalu dikaitkan oleh pasar modal, pemakai

laporan keuangan, dan profesi akuntansi dengan kelemahan dalam struktur *corporate governance* yang diterapkan perusahaan.

Komite audit di dalam perusahaan akan berperan mengawasi pengelolaan perusahaan agar lebih baik dengan melakukan penelaah atas informasi keuangan seperti laporan keuangan sehingga dapat membantu manajemen mengambil tindakan untuk mencegah berbagai resiko. Oleh karena itu, efektivitas komite audit dikaitkan dengan kemakmuran atau kesulitan keuangan perusahaan.

Komite audit yang independen membuktikan secara negatif terkait dengan kualitas laba (Suaryana, 2005, Siallagan, 2006) perusahaan dan menurunkan manajemen laba (Bukit dan Iskandar, 2009; Wardhani, 2010). Semakin besar independensi dalam Komite audit, maka semakin rendah probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba dan akan menyampaikan laba yang berkualitas. Hal ini mengusulkan bahwa kompetensi Komite audit membantu meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mengurangi kemungkinan manajer melakukan manajemen laba.

Penelitian ini mencoba meneliti hubungan antara karakteristik khusus dari Komite audit dengan kualitas laba dan manajemen laba pada perusahaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Suaryava *et al.* (2005) dan Wardhani, (2010) yang menguji tentang pengaruh Karakteristik Komite audit terhadap Kualitas laba (Suaryana, 2005) dan terhadap manajemen laba (Wardhani, 2010).

Karakteristik Komite audit yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ukuran keanggotaan Komite audit, independensi Komite audit dan frekuensi pertemuan dari para anggota Komite audit. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggabungkan dua penelitian menjadi satu penelitian yang dapat saling melengkapi dari kedua penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Karakteristik Komite audit terhadap Kualitas laba dan Manajemen Laba”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh ukuran komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba dan manajemen laba?
2. Bagaimana pengaruh anggota komite audit independen terhadap kualitas laba dan manajemen laba?
3. Bagaimana pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap kualitas laba dan manajemen laba?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap kualitas laba dan manajemen laba.
- b. Menganalisis pengaruh independensi komite audit terhadap kualitas laba dan manajemen laba.
- c. Menganalisis pengaruh frekuensi pertemuan komite audit terhadap kualitas laba dan manajemen laba.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Bagi regulator, sebagai wacana pentingnya pengawasan terhadap mekanisme *good corporate governance* oleh komite audit.
- b. Bagi manajemen, sebagai wacana tentang pentingnya peran komite audit untuk menghindari terjadinya *financial distressed*.
- c. Bagi kalangan akademisi dan pihak-pihak yang tertarik untuk melakukan penelitian sejenis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi.

BAB II

DASAR TEORI

2.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif *agency theory* merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *Corporate Governance*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) *agency theory* adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari *agency theory*.

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989 dalam Emirzon, 2007). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self-interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara *principal* dan *agent*. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak pemilik (*principal*) termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan manajer (*agent*) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi,

pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang di kehendaki.

Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen disebut dengan *agency problems*. Salah satu penyebab *agency problems* adalah adanya *asymmetric information*. *Asymmetric Information* adalah informasi yang tidak seimbang yang disebabkan adanya distribusi informasi yang tidak sama antara *principal* dan agen yang dapat berakibat menimbulkan dua permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan *principal* untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan *agent*. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah :

1. *Moral hazard*, yaitu permasalahan muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati bersama dalam kontrak kerja.
2. *Adverse selection*, yaitu suatu keadaan di mana *principal* tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar di dasarkan atas informasi yang telah diperoleh, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas.

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (*principal*) mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (*agent*) yang melakukan perkerjaan. Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989 dalam Darmawati,2005). Pertama adalah masalah keagenan yang timbul pada saat (a) keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari *principal* dan agen berlawanan dan (b) merupakan suatu hal yang sulit atau mahal bagi *principal* untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar dilakukan oleh agen. Permasalahannya adalah bahwa *principal* tidak dapat

memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang timbul pada saat *principal* dan agen memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. Dengan demikian, prinsipal dan agen mungkin memiliki preferensi tindakan yang berbeda dikarenakan adanya perbedaan preferensi resiko.

2.2. Manajemen Laba

Manajemen laba sebagai suatu proses pengambilan langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas *General Accepted Accounting Prinsip (GAAP)*. Pengertian manajemen laba oleh Scott (2000) adalah sebagai pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer. Scott mengungkapkan terdapat dua cara untuk memahami manajemen laba. Pertama, sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan biaya politik. Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak.

Faktor-faktor manajemen laba yang diajukan Watt dan Zimmerman (1996) dalam Sucipto dan Purwaningsih (2007) adalah:

a. *Bonus Plan Hypothesis*

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus terbesar berdasarkan *earnings* lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu *bogey* (tingkat laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan *cap* (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah *bogey*, maka tidak akan ada bonus yang diperoleh manajer sebaliknya jika laba berada di atas *cap*, maka

manajer juga tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah *bogey*, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi manajer hanya akan menaikkan laba jika laba bersih berada diantara *bogey* dan *cap*.

b. *Debt Covenant Hypothesis*

Kontrak hutang jangka panjang (*debt covenant*) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (kreditur) dari tindakan-tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur seperti deviden yang berlebihan dan pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada di bawah tingkat yang telah ditentukan.

Berdasarkan teori akuntansi positif, semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang, manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan.

c. *Political Cost Hypothesis*

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil tindakan seperti: mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

Scott (2000) dalam Rahmawati, dkk (2006) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba:

a. *Bonus Purpose*

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara *opportunistic* untuk melakukan laba dengan memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985).

b. *Political Motivations*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

c. *Taxation Motivations*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan.

d. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

e. *Initial Public Offering (IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* belum memiliki harga pasar sehingga perlu menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini menyebabkan manajer perusahaan yang *go public* melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya.

f. Pentingnya memberi informasi kepada investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.

Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dalam Rahmawati (2000) dapat dilakukan dengan cara:

a. *Taking a Bath*

Taking a bath terjadi pada saat reorganisasi seperti pengangkatan CEO baru. Teknik ini mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi.

b. *Income Minimization*

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

c. *Income Maximization*

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas *income maximization* bertujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang.

d. *Income Smoothing*

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil.

2.3. Kualitas Laba

Kualitas laba dapat diindikasikan sebagai kemampuan informasi laba memberikan respon kepada pasar. Dengan kata lain, laba yang dilaporkan memiliki kekuatan respon (*power of response*). Kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba yang tercermin dari tingginya *earnings response coefficients (ERC)*, menunjukkan laba yang dilaporkan berkualitas (Boediono, 2005).

Scott (2000), Cho dan Jung (1991) (dalam Boediono, 2005) menyatakan bahwa *ERC* mengukur seberapa besar *return* saham dalam merespon angka laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang mengeluarkan sekuritas tersebut. Dengan kata lain *ERC* adalah reaksi atas laba yang diumumkan (*published*) oleh perusahaan. Reaksi ini mencerminkan kualitas dari laba yang dilaporkan perusahaan. Dan tinggi rendahnya *ERC* sangat ditentukan kekuatan responsif yang tercermin dari informasi (*good/ bad news*) yang terkandung dalam laba. *ERC* merupakan salah satu ukuran atau proksi yang banyak digunakan untuk mengukur kualitas laba.

Ada beberapa hal yang menyebabkan respon pasar yang berbeda-beda terhadap laba, yaitu adalah persistensi laba, beta, struktur permodalan perusahaan, kualitas laba, *growth opportunities*, dan *informativeness of price* (Scott, 2000). Nilai *ERC* diprediksi lebih tinggi jika laba perusahaan lebih persisten di masa depan. Demikian juga jika kualitas laba semakin

baik, maka diprediksi nilai ERC akan semakin tinggi. Beta mencerminkan risiko sistematis. Investor akan menilai laba sekarang untuk memprediksi laba dan *return* di masa yang akan datang. Jika *future return* tersebut semakin berisiko, maka reaksi investor terhadap *unexpected earnings* perusahaan juga semakin rendah. Dengan kata lain, jika beta semakin tinggi, maka ERC akan semakin rendah (Scott, 2000). Struktur permodalan perusahaan juga berpengaruh terhadap ERC. Peningkatan laba (sebelum bunga) bagi perusahaan yang *high levered* berarti bahwa perusahaan semakin baik bagi pemberi pinjaman dibandingkan bagi pemegang saham. Oleh karena itu, perusahaan yang *high levered* memiliki ERC yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang *low levered*. (Scott, 2000 dalam Sayekti, 2007). Perusahaan yang memiliki *growth opportunities* diharapkan akan memberikan profitabilitas yang tinggi di masa datang, dan diharapkan laba lebih persisten. Dengan demikian, ERC akan lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki *growth opportunities* (Scott, 2000). Faktor lain juga mempengaruhi respon pasar terhadap laba adalah *informativeness* dari harga pasar itu sendiri. Biasanya *informativeness* harga pasar tersebut diproksi dengan ukuran perusahaan, karena semakin besar perusahaan semakin banyak informasi publik yang tersedia mengenai perusahaan tersebut relatif terhadap perusahaan kecil. Semakin tinggi *informativeness* harga saham, maka kandungan informasi dari laba akuntansi semakin berkurang. Oleh karena itu, ERC akan semakin rendah jika *informativeness* harga saham meningkat (atau jika ukuran perusahaan meningkat). (Scott, 2000 dalam Sayekti, 2007).

2.4. Komite Audit

Keberadaan Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia secara resmi dimulai sejak bulan Juni 2000 yang ditandai dengan keluarnya Keputusan Direksi BEJ No: Ke-315/BEJ/06/2000 perihal: Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A: Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa. Pada bagian ini dinyatakan bahwa dalam rangka

penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan yang terdaftar di BEJ wajib memiliki Komisaris Independen, Komite Audit, dan Sekretaris Perusahaan.

Tugas Komite Audit erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan dan ketaatan peraturan yang berlaku. Keberadaan Komite Audit menjadi sangat penting sebagai salah satu perangkat utama dalam penerapan *good corporate governance* dimana independensi, transparansi, akuntabilitas dan tanggungjawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan. Melalui Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000, Bapepam mensyaratkan pembentukan Komite Audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan diketuai oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang di bidang akuntansi dan keuangan.

Beberapa ketentuan Komite Audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, antara lain sebagai berikut :

- a. Pedoman *Good Corporate Governance* (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki Komite Audit
- b. Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- c. Kep. 339/BEJ/2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit
- d. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit
- e. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai Komite Audit.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKG, 2002) Komite Audit adalah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota Dewan Komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Komite Audit.

Bursa Efek Indonesia melalui Kep. Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan.

Peran Komite Audit adalah untuk mengawasi dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris dalam hal terciptanya mekanisme pengawasan (FCGI, 2002). Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-103/MBU/2002, dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas:

- a. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Ekstern sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
- b. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya.
- c. Memastikan bahwa telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan kepada pemegang saham.

- d. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas.
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komite Audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggungjawab, keterbukaan dan objektivitas Dewan Komisaris dan memiliki fungsi untuk :

- a. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama Dewan Komisaris
- b. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan-penyelewengan
- c. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peranan yang positif
- d. Membantu Direktur Keuangan, dengan memberikan suatu Kesempatan di mana pokok-pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan
- e. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok-pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif
- f. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen
- g. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektivitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Namun, Kewenangan Komite Audit dibatasi oleh fungsi komite sebagai alat bantu Dewan Komisaris, sehingga tidak memiliki otoritas eksekusi apapun dan hanya sebatas rekomendasi kepada Dewan Komisaris, kecuali untuk hal spesifik yang telah memperoleh hak kuasa eksplisit dari Dewan Komisaris, seperti mengevaluasi dan menentukan komposisi auditor

eksternal, dan memimpin suatu investigasi khusus. Peran dan tanggung jawab Komite Audit dituangkan dalam *Audit Committee Charter*.

Audit Committee Charter atau Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen Komisaris dan Dewan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan. Piagam Komite Audit yang telah disahkan akan menjadi acuan anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Piagam Komite Audit disosialisasikan kepada seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perusahaan. Piagam Komite Audit akan membantu anggota baru dalam melakukan orientasi sebagai Komite Audit dan berfungsi sebagai sarana komunikasi untuk menunjukkan komitmen Komisaris dan Dewan Direksi terhadap efektivitas *corporate governance*, pengendalian internal, *risk assessment*, dan pengelolaan perusahaan secara keseluruhan (FCGI).

Struktur Komite Audit di Indonesia diatur dalam Keputusan Menteri Nomor 117 tahun 2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan Bapepam yang relevan. Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai ketua Komite Audit. Dalam hal ini Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Adapun persyaratan Keanggotaan Komite Audit sesuai Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 :

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
- b. Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
- c. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- d. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- e. Bukan merupakan orang dari Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit dan atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris dan bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- f. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris.
- g. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
- h. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
- i. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

Artikel FGCI (2000) tentang peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam *Corporate Governance* menyatakan bahwa

independensi Dewan Komisaris di Indonesia sangat diragukan mengingat posisi anggota Dewan Komisaris diberikan sebagai rasa penghargaan semata maupun berdasarkan hubungan keluarga atau hubungan dekat. Dalam penggajian Dewan Komisaris didasarkan pada persentase gaji Dewan Direksi. Oleh karena itu, keberadaan sebuah komite yang independen menjadi mutlak untuk kepentingan *stakeholder*, selain dari kepentingan pemegang saham minoritas terlindungi.

Anggota Komite Audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-individu yang independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari alasan utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan.

Dalam setiap audit committee charter yang dimiliki oleh masing-masing anggota, Komite Audit akan mengadakan rapat secara periodik dan dapat mengadakan rapat tambahan atau rapat-rapat khusus bila diperlukan. Pertemuan secara periodik ini sebagaimana ditetapkan oleh Komite Audit sendiri dan dilakukan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan rapat dewan komisaris yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan. Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam satu tahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan (FCGI, 2002).

Komite Audit juga dapat mengadakan rapat eksekutif dengan pihak-pihak luar keanggotaan Komite Audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak-pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan kepala auditor eksternal. Hasil rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Komite Audit. Ketua Komite Audit

bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas rapat Komite Audit ini kepada dewan komisaris.

Apabila Komite Audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, Komite Audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja. Laporan yang dibuat dan disampaikan Komite Audit kepada komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit.
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan Komite Audit kepada dewan komisaris, Komite Audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal.

Rapat Komite Audit berfungsi sebagai media komunikasi formal anggota Komite Audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada *code of conduct*, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja finansial atau non-finansial perusahaan, memonitor bahwa perusahaan tunduk pada tiap undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya.

2.5. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1.	Siregar dan Utama (2005)	Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek <i>Corporate Governance</i> terhadap Pengelolaan Laba (<i>Earnings Management</i>)	Kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, praktek <i>Corporate Governance</i> (ukuran KAP, proporsi dewan komisaris, keberadaan komite audit)	(1) Kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. (2) Kepemilikan institusional dan tiga variabel praktek GCG tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
2.	Nasution dan Setiawan (2007)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia	Komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan	(1) Komposisi dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. (2) Komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba

3.	Fitriasari, Debby (2007)	Pengaruh Aktivitas Dan <i>Financial Literacy</i> Komite Audit Terhadap Jenis Manajemen Laba	Jumlah rapat komite audit, jumlah anggota komite audit yang memiliki kemampuan akuntansi dan atau keuangan, jumlah rapat komite audit dengan auditor eksternal dewan komisaris auditor eksternal, <i>leverage</i> , kapitalisasi perusahaan	Efektivitas komite audit dari sisi input dan prosesnya terbukti tidak bisa membuat jenis manajemen laba yang dilakukan perusahaan menjadi lebih efisien. Aktivitas rapat komite audit dengan fungsi SPI perusahaan ternyata tidak efektif untuk mengurangi manajemen laba yang bersifat oportunistik.
4	Suaryana, Agung (2005)	Pengaruh Komite Audit Terhadap Kualitas Laba	Komite Audit, ERC	Adanya perbedaan koefisien respon laba perusahaan yang membentuk komite audit dan perusahaan yang tidak membentuk komite audit
5	Wardhani, dkk (2010)	Karakteristik Pribadi Komite Audit dan Praktek Manajemen	Pengalaman dan keahlian bidang akuntansi dan keuangan, Komite audit	Variabel yang berdampak signifikan antara lain variabel latar belakang akuntansi dan keuangan, pengalaman

		Laba	memiliki pengalaman bekerja di KAP, ketua komite audit menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Tingkat pendidikan dari ketua komite audit. Ukuran perusahaan. Tingkat pertumbuhan perusahaan.	menjadi <i>partner</i> di suatu KAP
--	--	------	---	-------------------------------------

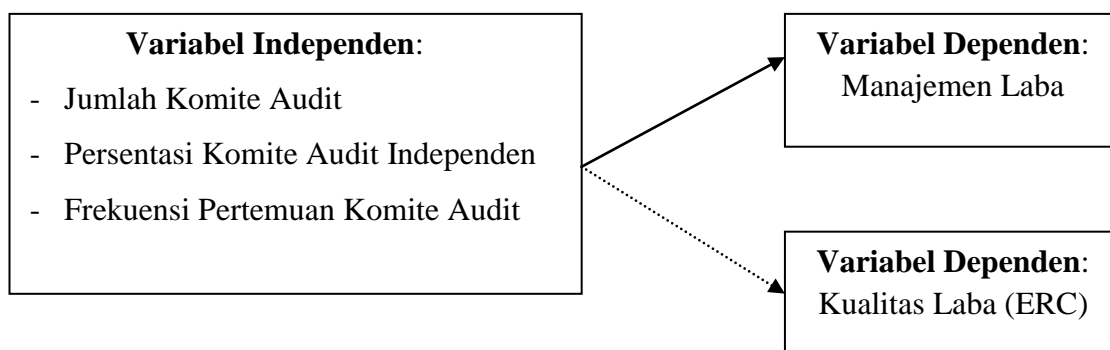
2.6. Kerangka Pemikiran

Manajemen laba merupakan salah satu bentuk akibat adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi dalam teori agensi. Hal ini dikarenakan manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Kehadiran *good corporate governance* diharapkan dapat menciptakan iklim tata kelola yang baik dan lebih transparan. *Good corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan urusan-urusan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Tujuan utama dari *good corporate governance* adalah untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain.

Penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk meminimalisasi terjadinya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh para manajer perusahaan. Penerapan *good corporate governance* khususnya yang berkaitan dengan komite audit diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba serta meningkatkan keinformatifan laba (kualitas laba). Oleh karena itu, diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah mekanisme *good corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba dan dapat meminimalisasi manajemen laba tersebut. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



2.7. Pengembangan Hipotesis

a. Hubungan Komite Audit dengan Manajemen laba

Dalam rangka untuk membuat Komite Audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab. Hasil penelitian sebelumnya pada penggabungan atas ukuran dan kinerja Komite Audit perusahaan tidak konklusif. Dalton *et al.* (1999) dalam Rahmat *et al.* (2008) menemukan

bahwa Komite Audit menjadi tidak efektif jika ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar. Komite Audit dengan jumlah anggota besar cenderung kehilangan fokus dan menjadi kurang partisipatif dibandingkan dengan ukuran yang lebih kecil. Di sisi lain, Komite Audit dengan jumlah anggota kecil kekurangan keterampilan dan pengetahuan yang beragam, sehingga menjadi tidak efektif. Ukuran Komite Audit yang tepat akan memungkinkan anggota untuk menggunakan pengalaman dan keahlian mereka bagi kepentingan terbaik *stakeholder*.

Namun, penelitian Pierce dan Zahra (1992) dalam Rahmat *et al.* (2008) menunjukkan hubungan positif antara ukuran Komite Audit dan kinerja keuangan perusahaan. Bahwa efektivitas Komite Audit meningkat ketika ukuran komite bertambah, karena memiliki sumber daya lebih untuk ditujukan pada isu atau masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

Komite audit merupakan pihak yang bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Komite audit dan komisaris independen merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh kualitas dan karakteristik komite audit.

Independensi merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh komite audit. Kondisi ini menunjukkan alasan mengapa bursa efek membuat peraturan yang mengangkut independensi komite audit. Jika kualitas dan karakteristik komite audit tercapai, maka transparansi

pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal.

Keanggotaan Komite Audit diatur dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-315/BEI/062000 bagian C, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota. Seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit. Sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan atau keuangan.

Komite audit bertugas untuk mengawasi proses pelaporan keuangan dalam perusahaan, sehingga keberadaan komite audit dalam perusahaan akan memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba. Pengawasan pada audit eksternal diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor sehingga dapat memperbaiki efektivitas audit. Oleh karena itu, keberadaan komite audit yang cukup independen dapat membantu dalam mengurangi aktivitas manajemen laba. Proporsi anggota komite audit independen berpengaruh negatif terhadap *earning management*. Semakin tinggi persentase anggota independen maka semakin kecil *earning management* yang dilakukan oleh perusahaan.

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membuktikan pengaruh independensi komite audit terhadap manajemen laba. Beasley (1996) menemukan hubungan negatif signifikan antara persentase komisaris independen dalam komite audit dengan kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Xie *et al.* (2003) yang juga menyatakan bahwa independensi komite audit juga berhubungan negatif dengan *discretionary accrual*.

Bapepam (2004) menghendaki bahwa komite audit mengadakan rapat dengan frekuensi yang sama dengan ketentuan minimal frekuensi rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Ketika komite audit lebih banyak melakukan

pertemuan dan lebih independen, manajer kemungkinan tidak menaikkan laba. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa melalui pertemuan dan pengamatan secara langsung, komite audit diharapkan dapat mengurangi tingkat manajemen laba.

Pertemuan dalam komite audit minimal dilakukan empat bulan sekali dan berdiskusi tentang laporan keuangan dengan auditor eksternal. Bapepam (2004) mensyaratkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Menon dan Williams (1994) dalam Pamudji dan Trihartati (2008) berpendapat bahwa komite audit yang tidak aktif tidak memungkinkan untuk memonitori manajemen secara efektif. Beasley *et al.* (2004) menemukan bahwa komite audit perusahaan yang melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan memiliki frekuensi pertemuan lebih sedikit daripada komite audit perusahaan yang tidak melakukan kesalahan dalam pelaporan keuangan.

Xie *et al.* (2003) melaporkan bahwa jumlah pertemuan komite audit berhubungan negatif dengan tingkat manajemen laba. Penelitian tersebut mengindikasikan bahwa komite audit yang melakukan pertemuan secara teratur akan menjadi pengawas yang lebih baik dalam mengawasi proses pelaporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Pamudji dan Trihartati (2008) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit ternyata tidak efektif mengurangi tingkat manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh pembentukan komite audit dalam perusahaan hanya bersifat *mandatory* terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti hubungan antara frekuensi rapat komite audit dengan manajemen laba. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

H_{1a} : Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

H_{1b} : Proporsi komite audit independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

H_{1c} : Frekuensi pertemuan komite audit independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.

b. Hubungan Komite Audit dan Koefisien Respon Laba (ERC)

ERC mengukur pengaruh dari satu dolar laba kejutan terhadap return saham, dan diukur sebagai slope dalam regresi return abnormal saham dan *unexpected earnings* (Cho dan Jung 1991 dalam Suaryana, 2005). Penelitian sebelumnya telah menggunakan ERC sebagai ukuran kualitas laba antara lain Choi dan Jeter (1990) menemukan ERC secara umum menurun pada periode setelah diberikan opini audit tidak wajar. Teoh dan Wong (1993) meneliti pengaruh persepsi kualitas auditor terhadap koefisien respon laba. Mereka berpendapat bahwa respon investor terhadap laba kejutan tergantung dari kredibilitas laporan laba. Hasil penelitian konsisten dengan dugaan awal bahwa koefisien respon laba klien KAP *Big Eight* secara statistik lebih besar daripada Klien KAP *non-Big Eight*.

Balsam et al. (2003) dalam Suaruana (2005) menguji hubungan antara kualitas laba dan auditor spesialis industri. Kualitas laba diukur dengan ERC perusahaan. Balsam et al. (2003) berpendapat auditor spesialis memberikan signal laba lebih kredibel dan kemudian laba dengan presisi yang lebih baik. Hasil penelitian adalah ERC perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis lebih besar dari ERC perusahaan yang tidak diaudit oleh auditor non spesialis.

Beberapa penelitian telah menguji hubungan antara ERC dan karakteristik komite audit. Anderson et al. (2003) menemukan karakteristik komite audit (independensi, aktivitas dan ukuran komite audit) mempengaruhi kandungan informasi dari laba yang diukur dengan ERC. Peningkatan independensi dan aktivitas komite audit berpengaruh positif terhadap kandungan informasi dari laba. Pengaruh

peningkatan independensi komite semakin berkurang pada saat komite audit aktif. Bryan et al. (2004) menemukan ERC lebih kuat ketika anggota komite audit independen dan ahli dalam bidang keuangan. Keberadaan komite audit independen dan memiliki keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan adalah signal persepsi kredibilitas dan kualitas laba perusahaan yang lebih baik. Laba yang kredibel dan berkualitas baik akan direspon lebih kuat (Teoh dan Wong 1993, Choi dan Jeter 1990, Anderson et al. 2003, Bryan et al. 2004) sehingga hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H2a : Ukuran komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba

H2b : Prosentasi komite audit independen memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba

H2c : Frekuensi pertemuan anggota komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini digunakan dua variabel untuk melakukan analisis data. Variabel tersebut terdiri dari variabel terikat (*dependent variabel*) dan variabel bebas (*independent variabel*). Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, independensi komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit.

a. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang terikat dan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Variabel dependen terdiri dari dua variabel yaitu manajemen laba dan kualitas laba.

1) Manajemen Laba

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga meratakan, menaikkan, dan menurunkan pelaporan laba. Pengukuran manajemen laba menggunakan *discretionary accrual* (DAC). Dalam penelitian ini *discretionary accrual* digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer. *Discretionary accrual* menggunakan komponen akrual dalam mengatur laba karena komponen akrual tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga dalam memainkan komponen akrual tidak disertai kas yang diterima/dikeluarkan. Untuk mengukur DAC, terlebih dahulu akan mengukur total akrual. Total akrual diklasifikasikan menjadi komponen *discretionary* dan *nondiscretionary*, dengan tahapan:

- a) Mengukur *total accrual* dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi.

$$\text{Total Accrual (TAC)} = \text{NI} - \text{CFO}$$

Dimana

NI : laba bersih setelah pajak (*net income*)

CFO : arus kas operasi (*cash flow from operating*)

- b) Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*):

$$\text{TAC}_t / A_{t-1} = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 ((\Delta \text{REV}_t - \Delta \text{REC}_t) / A_{t-1}) + \alpha_3 (\text{PPE}_t / A_{t-1}) + e$$

Dimana

TAC_t : *total accruals* perusahaan i pada periode t

A_{t-1} : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

REV_t : perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

REC_t : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_t : aktiva tetap (*gross property plant and equipment*) perusahaan tahun t

- c) Menghitung *nondiscretionary accruals* model (NDA) adalah sebagai berikut:

$$\text{NDA}_t = \alpha_1 (1 / A_{t-1}) + \alpha_2 ((\Delta \text{REV}_t - \Delta \text{REC}_t) / A_{t-1}) + \alpha_3 (\text{PPE}_t / A_{t-1})$$

Dimana

NDA_t : *nondiscretionary accruals* pada tahun t

α : *fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan *total accruals*

- d) Menghitung *discretionary accruals*

$$\text{DAC}_t : (\text{TAC}_t / A_{t-1}) - \text{NDA}_t$$

Dimana

DAC_t : discretionary accruals perusahaan i pada periode t

2) Kualitas Laba

Kualitas laba diukur dengan menggunakan *Earning Response Coefficient* (ERC). Besarnya ERC diperoleh dengan melakukan beberapa tahap perhitungan. Tahap pertama adalah menghitung *cumulative abnormal return* (CAR). Variabel return abnormal kumulatif saham (CAR) yang digunakan dalam penelitian merupakan abnormal return sepanjang periode jendela. Estimasi *abnormal returns* dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan model pasar yang menganggap bahwa penduga terbaik untuk mengestimasi *return* suatu sekuritas adalah *return* indeks pasar. Model ini tidak memerlukan periode estimasi untuk membentuk model estimasi, sehingga perhitungan *abnormal return* adalah:

$$AR_{it} = R_{it} - R_{m_t}$$

Keterangan :

AR_{it} : *Abnormal return* untuk perusahaan i pada hari ke t

R_{it} : *Return* harian saham perusahaan i pada hari t

R_{m_t} : *Return* indeks pasar pada hari t

Cumulative Abnormal Return (CAR) pada tanggal pengumuman laba didefinisikan sebagai:

$$CAR_{i(t_1,t_2)} = \sum_{t=t_1}^{t_2} AR_{it}$$

Keterangan :

AR_{it} : *Abnormal return* untuk perusahaan i pada hari ke t dan (t_1,t_2) adalah panjang interval return (periode akumulasi) dari hari t_1 hingga hari t_2 . Periode akumulasi return adalah 3 hari return meliputi tanggal pengumuman laba, 1 hari sebelum dan sesudah pengumuman laba.

Tahap kedua dalam mengetahui besarnya ERC adalah dengan menghitung *unexpected earnings* (UE) masing-masing perusahaan. UE merupakan proksi laba akuntansi yang menunjukkan hasil kinerja perusahaan selama periode tertentu. Dalam penelitian ini UE di hitung dengan menggunakan metode *random walk*.

$$UE_{it} = \frac{E_{it} - E_{it-1}}{E_{it-1}}$$

Keterangan :

UE_{it} : Laba non ekspektasian perusahaan i pada periode t

E_{it} : Laba akuntansi perusahaan i pada periode t

E_{it-1} : Laba akuntansi perusahaan i pada periode t-1

Earning Response Coefficient (ERC) merupakan koefisien yang diperoleh dari regresi antara proksi harga saham dan laba akuntansi. Proksi harga saham yang digunakan adalah CAR, sedangkan proksi laba akuntansi adalah UE.

$$CAR_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 UE_{it} + e$$

Keterangan :

$CAR_{i(-1,+1)}$: Abnormal return kumulatif perusahaan i pada 1 hari

sebelum dan sesudah laporan keuangan dipublikasikan

UE_{it} : Laba non ekspektasian perusahaan i pada periode t

b. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel bebas yang tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen.

1) Ukuran Komite Audit

Berdasarkan Surat Edaran Bapepam Nomor. SE-03/PM/2000 menyatakan bahwa komite audit pada perusahaan publik Indonesia terdiri dari sedikitnya tiga orang anggota dan

diketahui oleh Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen. Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dengan jumlah anggota di dalam komite audit.

2) Independensi Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004, independensi dari setiap anggota di ukur dengan persyaratan :

- a) Bukan merupakan orang dalam badan yang memberikan jasa audit, non-audit dan konsultasi kepada perusahaan
- b) Bukan merupakan eksekutif manajemen
- c) Tidak memiliki saham perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung
- d) Tidak memiliki hubungan keluarga dewan komisaris maupun dewan direksi
- e) Tidak memiliki hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha perusahaan.

Independensi dimaksudkan untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam menangani suatu permasalahan. Independensi komite audit pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen terhadap jumlah seluruh anggota komite audit.

Independensi komite audit (ACINDP) diperoleh dari perhitungan :

$$ACINDP = \frac{\text{jumlah anggota} - \text{jumlah anggota independen}}{\text{jumlah anggota}} \quad (3.1.2)$$

3) Frekuensi Pertemuan Komite audit

Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan (KNKG, 2002). Jadi variabel frekuensi pertemuan komite audit diukur dari jumlah pertemuan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

3.2. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah dari keseluruhan kelompok individu, kejadian-kejadian yang menarik perhatian peneliti untuk diteliti atau diselidiki (Sekaran, 2000). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan publik (non-perbankan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 - 2009.

Sampel adalah bagian dari populasi (elemen-elemen populasi) yang dinilai dapat mewakili karakteristiknya (Indriantoro dan Supomo, 1999). Dalam penelitian ini sampel merupakan pasangan antara perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara keuangan. Penentuan sampel akan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 – 2010.
- b. Perusahaan publik yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu dan perusahaan pasangannya yang *interest coverage ratio* tidak kurang dari satu, dengan tingkat aset dan dalam industri yang sama.
- c. Perusahaan yang tidak memiliki data laporan komite audit yang lengkap dikeluarkan dari sampel.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari pojok BEI UNDIP. Data tersebut

berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan publik (non-perbankan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD).

Laporan tahunan berisi informasi keuangan dan informasi non keuangan yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui kondisi perusahaan jika dilihat dari sisi keuangan dan non keuangan (berdasarkan kinerja). Kinerja perusahaan diidentifikasi dengan baik untuk memastikan perbandingan yang wajar antara perusahaan dengan kesulitan keuangan dengan perusahaan yang sehat secara keuangan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dengan data dokumentasi. Dokumentasi adalah penelitian arsip yang memuat kejadian masa lalu (Indriantoro dan Supomo, 1999: 146). Pengumpulan data dokumentasi dilakukan dengan kategori dan klasifikasi data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku, koran, majalah dan sebagainya.

3.5. Metode Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis pengaruh variabel independen terhadap industri yang mengalami permasalahan keuangan dibandingkan dengan yang sehat secara keuangan.

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai karakteristik komite audit pada perusahaan publik (non-perbankan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

b. Uji Asumsi Klasik :

1) Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi

normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. (Imam Ghozali, 2006).

Pada penelitian ini menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis (Imam Ghozali, 2006).

Ho : data residual berdistribusi normal

Ha : data residual tidak berdistribusi normal

Apabila nilai *signifikansi* lebih besar 5%, maka Ho diterima berarti data residual terdistribusi secara normal.

2) Uji Multikolinieritas

Pengujian ini bertujuan menguji apakah model regresi yang ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antara variabel independen. Multikolinieritas dilihat dari :

- Nilai tolerance dan lawannya
- Variance Inflation Factor (VIF)

3) Uji Heterokedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan deviasi standar nilai variabel dependen pada setiap variabel independen. Pengujian ini juga bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan tetap maka disebut Homokseditas dan jika berbeda maka disebut Heteroksiditas (Imam Ghozali, 2006). Heteroksiditas dapat dideteksi dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variable dependen (*Z PRED*) dan residualnya (*S-RESID*), dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah (Y yang diprediksi - Y

sesungguhnya). Apabila titik-titik pada grafik scatterplot menyebar secara acak dan tidak membentuk pola, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model tersebut layak dipakai.

Analisa dengan grafik plots memiliki kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil plotting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterpretasikan hasil grafik plot. Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil. Uji statistik yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah uji Glejser. (Imam Ghazali, 2006).

Uji Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variable independen (Gujarati, 2003 dalam Imam Ghazali, 2006) dengan persamaan regresi : $U_t = \alpha + \beta X_t + v_t$

Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas. Apabila variabel independen tidak signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolut U_t ($AbsU_t$) dengan probabilitas signifikannya diatas tingkat kepercayaan 5 %, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$. Uji Durbin Watson ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah : $H_0 =$ tidak ada autokorelasi ($r = 0$), dan $H_a =$ ada korelasi ($r \neq 0$). (Imam Ghazali, 2006).

c. Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini menggunakan metode regresi berganda. Dimana regresi berganda digunakan untuk menjelaskan varians suatu variabel independen yang berbeda interval atau dikotomi (*variabel dummy*) pada tingkat signifikan tertentu. Persamaan regresi yang digunakan adalah :

$$\text{Model 1 : DA} = a + b_1 \text{ ACSIZE} + b_2 \text{ ACIND} + b_3 \text{ ACMEET} + e_1$$

$$\text{Model 2 : ERC} = a + b_1 \text{ ACSIZE} + b_2 \text{ ACIND} + b_3 \text{ ACMEET} + e_2$$

Karena ERC merupakan koefisien parameter hubungan

$$\text{CAR}_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 \text{UE}_{it} + e$$

Dengan demikian maka persamaan regresi model 2 ditransformasi menjadi berikut :

$$\text{CAR}_{it} = a + b_1 \text{UE}_{it} + b_2 \text{ ACSIZE} + b_3 \text{ ACIND} + b_4 \text{ ACMEET} + b_5 \text{ UE*ACSIZE} + b_6 \text{ UE*ACIND} + b_7 \text{ UE*ACMEET} + e$$

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, digunakan uji koefisien determinasi, uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), dan uji signifikansi simultan (uji statistik f).

1) Uji koefisien determinasi (*goodness of fit test*)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan modal dalam menerapkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi menunjukkan persentase pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen yang dinyatakan dalam *adjusted R square* (R^2).

2) Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah masing-masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian adalah :

- a) H_0 diterima jika nilai probabilitas ($\text{sig } t$) > α (0,05) dan $p \text{ value} > 0,05$

b) H_0 ditolak jika nilai probabilitas (sig t) < α (0,05) dan p value < 0,05

3) Uji F

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan mempengaruhi variabel dependen.

Kriteria pengujian adalah :

a) H_0 diterima jika nilai probabilitas (sig f) > α (0,05) dan p value > 0,05

b) H_0 ditolak jika nilai probabilitas (sig f) < α (0,05) dan p value < 0,05